

SYAHARUDDIN NPM : 0606003644 DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO	Dosen Pembimbing 1. Arnold Ph. Djiwatampu, Ir.,IPM. 2. Prof. Dr.Ir. Dadang Gunawan. M.Eng
<b>STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN          MIGRASI DARI SISTEM PENYIARAN TELEVISI ANALOG KE SISTEM          PENYIARAN TELEVISI DIGITAL DI INDONESIA</b>  <b>”Penentuan Model Bisnis Penyelenggaraan Penyiaran Digital”</b>	
<p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Dalam era teknologi digital saat ini telah terjadi konvergensi dalam media penyiaran (<i>broadcasting</i>), media telekomunikasi dan media teknologi informasi. Perkembangan teknologi bidang penyiaran TV saat ini sedang beralih (migrasi) dari sistem analog ke sistem penyiaran digital karena sistem penyiaran TV digital dapat memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan sistem analog yaitu kualitas gambar dan suara yang lebih baik, lebih tahan terhadap gangguan interferensi, tersedianya layanan-layanan baru yang bersifat interaktif, pemanfaatan spektrum frekuensi yang lebih efisien serta kemampuan SFN (<i>Single Frequency Network</i>).</p> <p>Bagi pemerintah sebagai regulator, penerapan sistem penyiaran TV digital akan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, dimana 1 (satu) kanal TV analog dapat menyalurkan 4-8 program siaran TV digital, sehingga dapat menampung lebih banyak penyelenggara TV baru, dengan demikian sebagian spektrum penyiaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk dinas (<i>service</i>) lain yang akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.</p> <p>Penerapan sistem penyiaran TV digital juga berdampak secara finansial dengan adanya pengeluaran tambahan bagi penyelenggara TV yang ada untuk menyediakan perangkat digital, sedangkan bagi masyarakat diperlukan perangkat penerima TV digital baru atau <i>Set-Top-Box</i> yang dapat mengkonversi sinyal digital ke sinyal analog.</p> <p>Dalam pelaksanaan migrasi sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran TV digital diperlukan strategi kebijakan pemerintah yang tepat agar penerapan sistem penyiaran digital di Indonesia dapat berjalan dengan mulus. Dalam tesis ini akan memfokuskan pada analisa model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital dan proses perizinannya dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman dari beberapa negara- negara maju dan berkembang (<i>benchmarking</i>) dalam penerapan sistem penyiaran TV digital.</p> <p>Dengan menggunakan analisa kualitatif dalam tesis ini, maka akan dihasilkan rumusan identifikasi strategi kebijakan pemerintah dalam penerapan sistem penyiaran TV digital di Indonesia khususnya dalam penentuan model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital.</p>	
<p><b>Kata Kunci :</b> Strategi. Kebijakan. Pemerintah. penyiaran. Televisi. Digital. migrasi</p>	

SYAHARUDDIN NPM : 0606003644 Electrical Engineering Department	Counsellor 1. Arnold Ph. Djiwatampu. Ir.,IPM. 2. Prof. Dr.Ir. Dadang Gunawan. M.Eng
--	---

**GOVERNMENT POLICY STRATEGY IN THE IMPLEMENTATION OF  
MIGRATION FROM ANALOGUE TV BROADCASTING SYSTEM TO  
DIGITAL TV BROADCASTING SYSTEM IN INDONESIA**

“Decision of a Business Model for Digital Broadcasting Implementation”

**ABSTRACT**

In the present digital technology era, there has been technology convergence in broadcasting, telecommunication and information technology media. Presently, the TV digital broadcasting technology development is migrating from analogue to the digital broadcasting system, because digital TV broadcasting system provides better benefits compared to analogue TV broadcasting i.e. better sound and picture quality, resistance to harmful interference, the availability of new interactive services, more efficient frequency spectrum utilization and the capability of Single Frequency Network (SFN).

As for the government, as regulator, such digital TV broadcasting system implementation will be able to improve the efficiency of frequency spectrum utilization, in which one (1) analogue TV channel can distribute 4-8 digital TV programmes, therefore it can accommodate more TV broadcasters, as a result some of broadcasting spectrum can be used for other services for the benefit of the State income in the form of the Frequency Utilization Rights Fee.

The implementation of digital broadcasting system will also affect financially as additional cost since existing TV broadcasters must provide digital equipment, whereas the public is required to purchase the new digital TV receiver equipment or Set-Top-Box which could convert digital signal to analogue during the transition period.

In the implementation of migration from analogue TV broadcasting system to digital TV broadcasting system, it is necessary to have the right government policy strategy in order to have smoothly migration implementation in Indonesia. This paper focuses on analysis towards business model of digital broadcasting implementation and its licensing process by considering developed and developing countries' experiences (benchmarking) within the implementation of digital TV broadcasting system.

With the support of qualitative Analysis made in this thesis, therefore we will have the formulation of identification strategy on government policy in the implementation of digital TV broadcasting in Indonesia particularly in decision of a business model for digital broadcasting implementation.

**Keywords :** Strategy. Policy. Government. Broadcasting. Television. Digital. Migration